

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum perkembangan perekonomian dan pasar keuangan global terus membaik. Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai sekitar 6,7%. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, iklim investasi yang semakin kondusif, dan kinerja ekspor semakin meningkat. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 diperoleh dari berbagai macam sumber, yaitu: (1) penerimaan perpajakan: Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non-migas, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya; (2) penerimaan negara bukan pajak (PNBP): semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), bagian Pemerintah atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan negara bukan

pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU); dan (3) penerimaan hibah: semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan negara (milyar rupiah) dalam periode tahun 2009 hingga tahun 2011:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah) Tahun 2009-2011

Sumber Penerimaan		2009	2010	2011
Penerimaan Perpajakan		619,922	723,307	878,685
	Pajak Dalam Negeri	601,252	694,392	831,745
	Pajak Penghasilan	317,615	357,045	431,977
	Pajak Pertambahan Nilai	193,067	230,605	298,441
	Pajak Bumi dan Bangunan	24,27	28,581	29,058
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,465	8,026	-
	Cukai	56,719	66,166	68,075
	Pajak Lainnya	3,116	3,969	4,194
	Pajak Perdagangan Internasional	18,67	28,915	46,94
	Bea Masuk	18,105	20,017	21,501
	Pajak Ekspor	0,565	8,898	25,439
Penerimaan Bukan Pajak		227,174	268,942	286,568
	Penerimaan Sumber Daya Alam	138,959	168,825	191,976
	Bagian laba BUMN	26,05	30,097	28,836
	Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53,796	59,429	50,34
	Pendapatan Badan Layanan Umum	8,369	10,591	15,416
Jumlah		847,096	992,249	1,165,253

Sumber: Departemen Keuangan yang telah diolah, 2012.

Sehubungan dengan kondisi ekonomi Indonesia dan berdasarkan realisasi penerimaan negara pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara yang paling berpotensi berasal dari sektor pajak. Penerimaan negara tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan pengeluaran pemerintah lainnya. Hal ini menyebabkan pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak, serta meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang merugikan negara.

Sebagaimana telah diketahui, sejak Reformasi Perpajakan pada tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dalam hal ini Wajib Pajak lah yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo 2010, 332).

Untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan undang-undang diperlukan penegakkan hukum (*law enforcement*). Jika Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan, maka akan mendapatkan atau dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan dapat berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan (Widyaningsih 2011, 312). Pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum

(Mulyodiwarno 2007, 22). Dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah melalui Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan pajak (Madani 2008, 40).

Namun dalam kenyataannya, pemeriksaan pajak merupakan salah satu hal yang paling dihindari dan ditakuti oleh setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang bayar dan bahkan jumlah atas kurang bayar tersebut harus dibayar berkali lipat dari jumlah yang telah dibayar. Selain itu, sebagian Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi beban pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Kecurangan-kecurangan tersebut mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berdampak dengan penerimaan pajak.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) oleh Fitriandi dan rekan (2010, 69) menjelaskan bahwa bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Terdapat pula usaha yang dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan agar jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat bertambah dan pelunasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan intensifikasi pajak untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat

atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat produktivitas pemeriksaan dan pengaruh setelah dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa di wilayah Kabupaten Tangerang. Sehingga, dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA.”**

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya meliputi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 pada KPP Pratama Tigaraksa.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana tingkat produktivitas pemeriksaan pada KPP Pratama Tigaraksa?
2. Bagaimana pengaruh tindakan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tigaraksa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup masalah, dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat produktivitas pemeriksaan pada KPP Pratama Tigaraksa.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tigaraksa.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi:

1. Penulis

Hasil penulisan skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Serta dapat melatih dalam menganalisa secara ilmiah dan memecahkan masalah dengan baik.

2. KPP Pratama Tigaraksa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang positif bagi instansi tentang Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Tigaraksa.

3. Pembaca

Hasil penulisan yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya kepatuhan dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara umum mengenai latar belakang permasalahan, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan kerangka pemikiran yang mengaitkan masalah dengan konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan dasar-dasar teori yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang objek studi kasus, tahapan studi kasus, teknik pengumpulan data/informasi, dan teknik analisis/evaluasi studi kasus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan terkait dengan rumusan permasalahan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup, dimana penulis mengutarakan simpulan dari permasalahan penelitian dan memberikan saran atau masukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan yang mungkin berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, kalangan akademis, maupun kalangan pembaca.